

RENCANA STRATEGI 2017-2022



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial	6
2.1.1 Tugas	6
2.1.2 Fungsi	6
2.1.3 Struktur Organisasi	7
2.2 Sumber Daya	8
2.2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	8
2.2.2 Jumlah Pegawai yang Telat Mengikuti Pelatihan Penjurusan	8
2.2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	9
2.2.4 Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Eselonisasi	9
2.2.5 Fasilitas Pelengkapan	10

2.3 Kinerja Pelayanan	12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	12
2.4.1 Tantangan	12
2.4.2 Peluang	13
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL	14
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	
3.2.1 Identifikasi dan Analisa Lingkungan Strategis	14
3.2.2 Keseimbangan Lingkungan Internal dan Eksternal	16
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Terpilih.....	17
3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga.....	17
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	19
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	19
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	21
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	22
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	23
BAB VII KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	24
BAB VIII PENUTUP	25

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	8
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan	8
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	9
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselonisasi	9
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala	11
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2017-2022	21
Tabel 5.1	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala 2017 – 2022	22
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial	23
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	24

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|---|
| Lampiran 1 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala |
| Lampiran 2 | Tujuan dan sasaran Jangka Menengah |
| Lampiran 3 | Tujuan, Sasaran dan Kebijakan |
| Lampiran 4 | Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala |
| Lampiran 5 | Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencapaian tujuan suatu organisasi yang dikelola secara modern hanya dapat dicapai jika menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara baik. Salah satu fungsi manajemen adalah fungsi perencanaan. Perencanaan menurut dimensi waktu dapat dikelompokkan ke dalam perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah perlu disusun untuk dipedomani dalam menyusun perencanaan jangka pendek.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Rencana pembangunan daerah berupa Dokumen Rencana Strategis (Renstra) disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala menyusun serangkaian program dan kegiatan mendasar, untuk diimplementasikan oleh seluruh komponen dinas dalam rangka pencapaian tujuan, yang tentunya merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 didasari dari Visi dan Misi Bupati Barito Kuala dalam **Rencana Strategis Dinas**

Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas

Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 adalah:

1. Landasan Idiil: Pancasila;
2. Landasan Konstitusional: UUD 1945;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022; dan
 18. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.
 19. Perda no 6 thn 2012 ttg RTRWK Batola tahun 2012-2031

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten

Barito Kuala Tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah dan pedoman serta mendayagunakan seluruh potensi yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dalam menjawab tuntutan perkembangan permasalahan dan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Barito Kuala dalam kurun waktu 2017-2022;
2. Mempermudah pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial

- Kabupaten Barito Kuala baik secara internal maupun eksternal; dan
3. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2017 adalah:

- 1) Agar dapat mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, menganalisa/mengkaji secara objektif keberhasilan yang ingin dicapai dengan berorientasi ke masa depan.
- 2) Agar dapat memberikan layanan prima dalam usaha kesejahteraan sosial dengan melibatkan seluruh pelaku (*stakeholder*) penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial
- 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan Dinas Sosial

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan
Wakil Bupati Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L)

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Sosial

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN**

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala sebagai instansi Pemerintah dalam lingkup Kabupaten Barito Kuala bertugas melaksanakan urusan di Bidang Sosial dengan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.

2.1.1 Tugas

Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

2.1.2 Fungsi

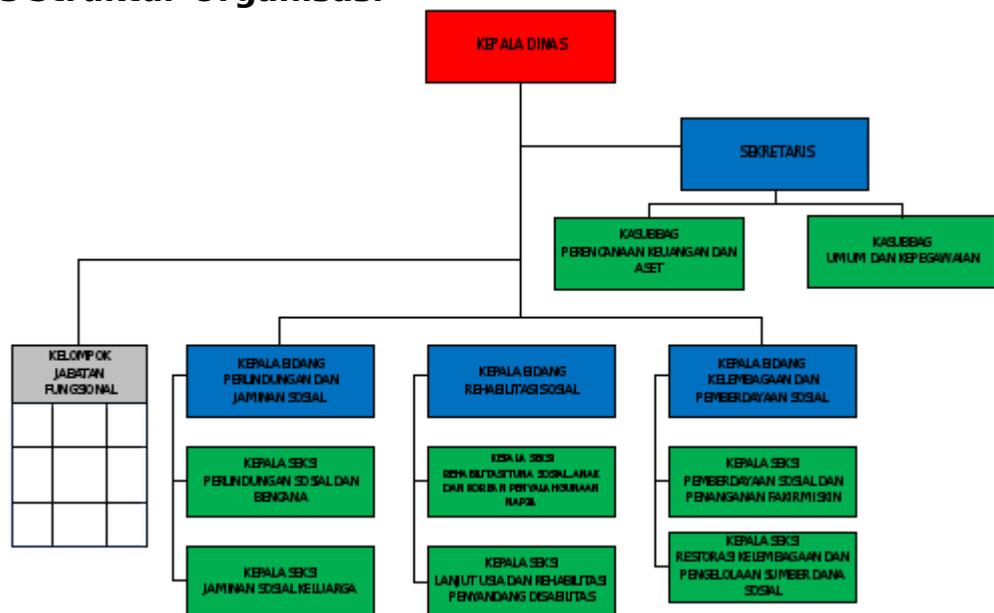
Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala melaksanakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial.
3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur

organisasi di lingkungan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial.

4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial.
5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

2.1.3 Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Bagan SOTK Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala

2.1.3.1 Unsur Pelaksana

1. Sekretariat, terdiri dari (a) Sub Bagian Umum Kepegawaian, (b) sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari (a) Seksi Perlindungan Sosial dan Bencana, (b) Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
3. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari (a) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Anak dan Korban Penyalahgunaan Napza, (b) Seksi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas.
4. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial terdiri dari, (a) Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, (b) Seksi Restorasi Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial.

2.1.3.2 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan Fungsional hingga saat ini belum terisi meskipun secara struktur organisasi posisi ini tersedia.

2.1 Sumber Daya Dinas Sosial

2.2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Secara Keseluruhan jumlah pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala berjumlah 21 orang, yang terdiri dari 9 orang pria dan 12 orang wanita yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sedangkan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan formal sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Strata 3	- orang Pria - orang Wanita	0,00% 0,00%
2	Strata 2	1 orang Pria 4 orang Wanita	5,00% 21,00%
3	Strata 1	5 orang Pria 5 orang Wanita	21,00% 16,00%
4	Strata D. III	- orang Pria - orang Wanita	0,00% 0,00%
5	SLTA	3 orang Pria 3 orang Wanita	16,00% 21,00%
Jumlah		9 orang Pria 12 orang Wanita	42,00% 58,00%

2.2.2 Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan

Penjenjangan

Keadaan pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No	Jenis Pelatihan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Diklat Pim II	1 Orang Pria - Orang Wanita	5,00%
2	Diklat Pim III	2 Orang Pria 1 Orang Wanita	5,00% 5,00%
3	Diklat Pim IV	2 Orang Pria 5 Orang Wanita	11,00% 26,00%
Jumlah		5 Orang Pria 6 Orang wanita	21,00% 32,00%

2.2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Secara umum sebagian besar pegawai di dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala adalah Golongan IV (empat) berjumlah 5 orang (21,00%), Golongan III (tiga) berjumlah 11 orang (58,00%) dan Golongan II (dua) berjumlah 4

orang (21,00%). Secara rinci keadaan pegawai berdasarkan golongan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah (orang)	
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang Pria	- orang wanita
2	Pembina Muda Tk. I (IV/b)	1 orang Pria	1 orang wanita
3	Pembina (IV/a)	- orang Pria	1 orang wanita
4	Penata Tk I (III/d)	2 orang Pria	3 orang wanita
5	Penata (III/c)	1 orang Pria	2 orang wanita
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	2 orang Pria	1 orang wanita
7	Penata Muda (III/a)	- orang Pria	- orang wanita
8	Pengatur Tk. I (II/d)	1 orang Pria	- orang wanita
9	Pengatur (II/c)	- orang Pria	1 orang wanita
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	- orang Pria	2 orang wanita
Jumlah		8 orang Pria	11 orang wanita

2.2.4 Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan

Eselonisasi

Menduduki jabatan struktural dan fungsional (non angka kredit) di Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Eselonisasi

No	Jabatan Eselon	Jumlah (orang)	Persentase
1	Eselon II. B	1 Orang Pria - Orang wanita	5,00% -
2	Eselon III. a	- Orang Pria - Orang wanita	- -
3	Eselon III. b	1 Orang Pria	5,00%

		1 Orang wanita	5,00%
4	Eselon IV. A	3 Orang Pria 5 Orang wanita	16,00% 26,00%
5	Non Struktural/ Fungsional Non angka Kredit	3 Orang Pria 5 Orang wanita	16,00% 26,00%
Jumlah ASN		8 Orang Pria 1 Orang 1 wanita	42,00% 58,00%

2.2.5 Fasilitas Perlengkapan

Fasilitas atau perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung

pelaksanaan tugas Dinas Sosial berupa:

1. Peralatan kantor dan mesin memadai
2. Gedung dan bangunan semi permanen
3. Jaringan telpon, listrik dan air yang memadai
4. Aset tetap lainnya.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial

Kabupaten

Barito

Kuala meliputi pelayanan terhadap Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Kinerja

pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun

2012-2017 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Barito
Kuala Tahun 2012-2017

(Lampiran)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dinas Sosial

Keberhasilan upaya pembangunan kesejahteraan sosial dan pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan *stakeholder* yang ada, sehingga dapat diwujudkan pelayanan kesejahteraan sosial yang cukup komprehensif.

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pemberian pelayanan kesejahteraan sosial yang holistik, komprehensif dan berkelanjutan adalah:

1. Tren Permasalahan Sosial yang terus berkembang sebagai akibat dari adanya krisis, konflik sosial, bencana alam dan gejala disintegrasi sosial.
2. Belum validnya *database* PMKS Kabupaten Barito Kuala
3. Belum adanya SPM Bidang Sosial
4. Belum optimalnya kerja sama antar bidang pada Dinas
5. Belum optimalnya pengintegrasian program dan kegiatan Dinas dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
6. Pembangunan kesejahteraan sosial yang dilakukan, khususnya dalam penanganan PMKS yang dikembangkan selama ini umumnya tidak berjalan efektif atau tidak maksimal, karena cenderung hanya menyentuh masalah di hilir, sementara akar masalah di tingkat hulu tidak banyak ditangani. Pendekatan penyantunan terhadap PMKS memang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tetapi dengan dukungan dana yang terbatas, tentu sulit bagi Dinas Sosial dan dinas terkait lain di Kabupaten Barito Kuala untuk dapat mengatasi akar masalah yang sebenarnya.

7. Ancaman bencana alam banjir dan bencana sosial merupakan bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
8. Masih rendahnya komitmen sebagian penerima manfaat program untuk mendukung tercapainya tujuan dari program/kegiatan yang diberikan.
9. Kurang optimalnya penanganan, perawatan dan kepedulian anggota keluarga atau kerabat terhadap PMKS itu sendiri.

2.4.2 Peluang

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan adalah:

1. Tersedianya sumber daya manusia (SDM)/ASN pada Dinas.
2. Adanya sarana dan prasarana kerja yang memadai
3. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Dinas Sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial
4. Kearifan lokal yang ada ditengah kehidupan masyarakat
5. Keberadaan dunia usaha melalui program CSR yang mereka miliki
6. Berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang dapat mendukung peran dan mempermudah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

Dinas sosial Kabupaten Barito Kuala yang melaksanakan urusan Bidang Sosial memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan Program/Kegiatan urusan sosial.

3.1.1 Identifikasi dan Analisa Lingkungan Strategis

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 disusun dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal. Pemahaman terhadap perubahan lingkungan strategis akan mendorong pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 secara efektif dan efisien dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

3.1.1.1 Identifikasi dan Analisa Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Analisa lingkungan internal pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala meliputi identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, yaitu:

1. Kekuatan, yang dimiliki:
 - a. Tersedianya sumber daya manusia (SDM)/ASN yang ada.

- b. Adanya sarana dan prasarana kerja yang memadai.
 - c. Berkembangnya kemampuan ASN dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial dari waktu ke waktu.
2. Kelemahan, yang dimiliki:
- a. Ketersediaan *database* PMKS yang belum valid.
 - b. Belum adanya SPM Bidang Sosial
 - c. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai sebagai pelaku pembangunan kesejahteraan sosial.
 - d. Belum optimalnya kerjasama antar bidang pada Dinas
 - e. Pembangunan kesejahteraan sosial yang dilakukan, khususnya dalam penanganan PMKS yang dikembangkan selama ini umumnya tidak berjalan efektif atau tidak maksimal, karena cenderung hanya menyentuh masalah di hilir, sementara akar masalah di tingkat hulu tidak banyak ditangani. Pendekatan penyantunan terhadap PMKS memang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tetapi dengan dukungan dana yang terbatas, tentu sulit bagi Dinas Sosial dan dinas terkait lain di Kabupaten Barito Kuala untuk dapat mengatasi akar masalah yang sebenarnya.
 - f. Sinergitas dan sinkronisasi program/anggaran yang kurang konsisten, efektif, berkelanjutan dan terfokus serta sulit diukur tingkat capaian keberhasilannya.

3.1.1.2 Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal Identifikasi dan analisa lingkungan eksternal Dinas

Sosial Kabupaten Barito Kuala dilakukan untuk mencatat dan mengkaji peluang yang tersedia dan ancaman yang mungkin muncul dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas dalam 5 (lima) tahun mendatang (2017-2022). Berdasarkan hasil identifikasi dan analisa lingkungan eksternal, peluang dan ancaman yang harus dihadapi oleh

Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dalam menjalankan tupoksi adalah sebagai berikut:

1. Peluang, yang ada:
 - a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Dinas Sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial
 - b. Kearifan lokal yang ada ditengah kehidupan masyarakat
 - c. Keberadaan dunia usaha melalui Program CSR yang mereka miliki
 - d. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung peran Dinas Ancaman, yang ada:
 - a. Tren permasalahan sosial yang terus berkembang sebagai akibat dari adanya krisis, konflik sosial, bencana alam dan gejala disintegrasi sosial
 - b. Masih rendahnya komitmen sebagian penerima manfaat program untuk mendukung tercapainya tujuan dari program/kegiatan yang diberikan.
 - c. Komitmen politik dan dukungan anggaran (APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi) rendah
 - d. Ancaman bencana alam banjir dan bencana sosial merupakan bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
 - e. Kurang optimalnya penanganan, perawatan dan kepedulian anggota keluarga atau kerabat terhadap PMKS itu sendiri.

3.1.2 Keseimbangan Lingkungan Internal dan Eksternal

Berdasarkan hasil identifikasi lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan dengan identifikasi lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman, menunjukkan keseimbangan yang positif. Kondisi ini menyiratkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala

masih harus meningkatkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan bidang sosial

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2017-2022.

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2017-2022 adalah : **“Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota”** yang dijabarkan sebagai berikut:

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, ditempuh melalui 4 (empat) Misi, yaitu :

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota;
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian;
3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia; dan
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, untuk pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 maka Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala melaksanakan misi ke-3, yaitu : **“Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesional Sumber Daya Manusia”**.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial RI Dan Renstra Dinas Sosial Provinsi

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan

Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Visi Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2015-2019 adalah: **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”**.

Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mencapai Visi tersebut diatas, ditempuh dengan melaksanakan 7 (tujuh) Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi, dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan penduduk maju, berkeadilan, dan demokratis berdasarkan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif, dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang Tinggi, Maju, dan Sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritime yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan penduduk yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan strategi pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang ingin dicapai Dinas Sosial kabupaten Barito Kuala sesuai Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2017-2022 adalah : **“Meningkatkan Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”**, dengan sasaran strategi. **“Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”**. Sasaran ini selaras dengan Visi dan Misi Bupati Barito

Kuala yaitu **“Terwujudnya Barito Kuala Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)”**, pada Misi ke-3 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan profesionalitas Sumber Daya Manusia”** dan sasaran ke-2 yaitu **“Meningkatnya Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat”**.

Sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala ini juga mendukung terwujudnya Visi Kementerian Sosial Republik Indonesia yaitu: **“Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang Tinggi, Maju, dan Sejahtera”**.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala sebagai perangkat daerah yang membantu Kepala Daerah dalam pembangunan Bidang Sosial tidak membahas mengenai tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala, telaahan tujuan dan sasaran Kementerian Sosial, dapat disimpulkan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala adalah : **“Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**

(PMKS) dan Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), yang di iringi dengan :

1. Ketersediaan *database* PMKS yang belum valid
2. Belum adanya SPM Bidang Sosial
3. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai sebagai pelaku pembangunan kesejahteraan sosial.
4. Pembangunan kesejahteraan sosial khususnya dalam penanganan PMKS memang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tetapi dengan dukungan dana yang terbatas, tentu sulit bagi Dinas Sosial dan Dinas terkait lain di Kabupaten Barito Kuala untuk dapat mengatasi akar masalah yang sebenarnya.
5. Sinergitas dan sinkronisasi program/anggaran yang kurang konsistensi, efektif, berkelanjutan dan terfokus serta sulit diukur tingkat capaian keberhasilannya.
6. Komitmen politik dan dukungan anggaran (APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi) rendah.
7. Ancaman bencana alam banjir dan bencana sosial merupakan bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
8. Kurang optimalnya penanganan, perawatan dan kepedulian anggota keluarga atau kerabat terhadap PMKS itu sendiri.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS SOSIAL

Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembangunan sosial selama Tahun 2017-2022 sesuai visi dan misi yang ada pada RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

Memperhatikan visi, misi tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dalam 5 (lima) tahun mendatang, yaitu :

TABEL 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
(Lampiran)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan SKPD, yang perlu diperhatikan adalah tor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan organisasi secara menyeluruh. Pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal Dinas dengan keanekaragamannya.

Analisa lingkungan internal tentang kekuatan dan kelemahan. Juga analisa lingkungan eksternal tentang peluang dan ancaman bagi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dalam 5 (lima) tahun mendatang, telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yang dimaksudkan untuk menentukan strategi dan kebijakan yang harus ditempuh oleh Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2017-2022.

Strategi merupakan suatu respon terhadap tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan, program/kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial. Strategi juga diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala. Strategi yang disusun, juga harus mengacu dengan kebijakan dan tujuan

pembangunan Kabupaten Barito Kuala secara keseluruhan. Dalam mengemba tugas dan wewenangnya, Dinas Sosial harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap pada jalur yang telah ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik untuk aparatur maupun masyarakat yang dilayani.

Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
(Lampiran)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dibuat, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala guna mewujudkan visi Pemerintahan Kabupaten melalui pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama merupakan rincian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan dan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala setiap tahunnya.

TABEL 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial
(Lampiran)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2022 melalui Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala. Mengingat eratnya kaitan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dengan pencapaian Visi dan Misi yang ada, maka harus disusun untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Sosial Kabupten Barito Kuala seperti tercantum dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam pencapaian Misi, Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala harus mampu berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke 3, yaitu : Meningkatkan kualitas ketaqwaan, kecerdasan Kesehatan, dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia.

Indicator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD
(Lampiran)

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala periode 2017-2022 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kuala untuk 5 (lima) tahun kedepan. Keberhasilan penjabaran Renstra Periode 2017-2022 sangat ditentukan oleh kesiapan dinas, ketatalaksanaan, SDM, anggaran dan komitmen seluruh jajaran ASN yang ada. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2017-2022, setiap tahun akan dilakukan evaluasi, jika diperlukan, dapat dilakukan perubahab/revisi muatan Renstra, termasuk indikator kinerja yang ada dalamnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Periode 2017-2022.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Periode 2017-2022 dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial periode lalu dengan periode mendatang dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala 2005- 2025.

Hasil pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 akan menjadi tolak ukur keberhasilan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala yang akan disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Barito Kuala pada setiap tahun anggaran dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No.	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Kinerja (%)				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase keluarga miskin yang berhasil mengembangka usaha	100%	100%	100%	100%	100%
				- Persentase lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%	100%	100%
				-Persentase penyandang Disabilitas yang Mandiri	100%	100%	100%	100%	100%
				-Persentase anak terlantar yang dikembangkan bakat dan keterampilan kerjanya	100%	100%	100%	100%	100%
				- Persentase Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%	100%	100%

				- Persentase data RTM yang sudah diverifikasi dan validasi	100%	100%	100%	100%	100%
				- Persentase peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan preventif terhadap penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya	100%	100%	100%	100%	100%
				- Persentase peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan preventif terhadap kekerasan pada anak	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase pemenuhan bantuan sosial korban bencana alam dan atau bencana sosial	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase PSKS baik per orang maupun kelompok yang aktif dalam masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota		
MISI : Meningkatkan Kemampuan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Peningkatan Kualitas Wira usaha, Bantuan, perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Sumber Daya Manusia
ARAH KEBIJAKAN
Pelatihan dan Pendampingan Wira Usaha PMKS
Pemberian bantuan, perlindungan dan jaminan sosial yang tepat guna dan tepat sasaran

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Tahun 2018
						Target/Pagu
Meningkatkan Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.06.1.06.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Keluarga Miskin yang Berhasil Mengembangkan Usaha	100%	125 254,124,739
			Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang Menerima Bantuan KUBE	420	90 254,124,739
				Jumlah Keluarga Rawan Sosial Ekonomi yang Menerima Stimulan Usaha	100	20
				Jumlah Penerima Bantuan Peralatan Rumah Tangga/Meubeler	15	15

1.06.1.06.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas yang Berhasil Mandiri	100%	32 253,207,783
		Persentase Lanjut Usia Potensial Penerima Bantuan Usaha yang Berhasil Mandiri		
		Persentase Lanjut Usia yang Terpenuhi Kebutuhannya		
	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mengikuti Pelatihan Kerja Berbasis	9	
		Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Bantuan Stimulan Usaha	17	
		Jumlah Lansia Potensial yang Menerima Bantuan Stimulan Usaha	225	

			Jumlah Lansia Potensial yang Menerima Bantuan Bedah Rumah	8	
	1.06.1.06.01.17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar yang Dikembangkan bakat dan Keterampilan Kerjanya	100%	100 240,502,294
		Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Mengikuti Pelatihan Kerja Berbasis Panti		
		Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak	Jumlah Anak Terlantar yang Mengikuti Pelatihan Beternak		

Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
Target/Pagu	Target/Pagu	Target/Pagu	Target/Pagu	Target/Pagu		
125 266,830,976	125 279,537,213	125 292,243,450	125 304,945,687	625 1,397,682,065	Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial	
90 266,830,976	90 279,537,213	90 292,243,450	90 304,945,687	270		
20	20	20	20	100		
15	15	15	15	75		

32 265,868,172	32 278,528,561	32 291,188,950	32 303,849,340	160 1,392,642,806	Bidang Rehabilitasi Sosial	

100 252,527,409						

Tabel. 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasar

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Persentase keluarga miskin yang berhasil mengembangkana usaha	8,281	1.09%	1.09%	1.09%	1.09%
2	- Persentase lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	2368	100%	100%	100%	100%
3	-Persentase penyandang Disabilitas yang Mandiri	2759	0.18%	0.18%	0.18%	0.18%
4	-Persentase anak terlantar yang dikembangkan bakat dan keterampilan kerjanya	0	100%	100%	100%	100%
5	- Persentase Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	10540	100%	100%	100%	100%
6	- Persentase data RTM yang sudah diverifikasi dan validasi	105,590	20%	20%	20%	20%

7	- Persentase peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan preventif terhadap penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya	0	100%	100%	100%	100%
8	- Persentase peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan preventif terhadap kekerasan pada anak	0	100%	100%	100%	100%
9	Persentase pemenuhan bantuan sosial korban bencana alam dan atau bencana sosial	0	100%	100%	100%	100%
10	Persentase PSKS baik per orangan maupun kelompok yang aktif dalam masyarakat	261	100%	100%	100%	100%

an RPJMD

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
7,831
2,238
2,734
0
1,306
100%

150
0
100%
261